

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan melihat bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Tangerang Selatan melalui teori manajemen kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A Tangerang Selatan selaku pusat pelayanan terpadu mengenai permasalahan perempuan dan anak, sebagai unit yang melaksanakan pelayanan tugas teknis operasional dinas dibidang perlindungan perempuan dan anak terlihat belum sepenuhnya maksimal. Usaha pelayanan dari instansi pemerintah membangun interaksi antara pemberi layanan dan penerima layanan dengan tujuan pemecahan masalah publik (klien). Pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan melakukan penjangkauan, asesmen, menyusun rencana intervensi, dan melakukan rujukan kepada lembaga lain yang berkaitan. Proses collaborative governance ditunjukkan dalam pelaksanaan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap tahapan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Peneliti melihat masih terdapat kurangnya koordinasi antar lembaga yang berkaitan terutama dalam tahap penjangkauan dan monitoring & evaluasi. Kemudian terdapat sumber daya manusia yang masih kurang, dan fasilitas dalam pelaksanaan penanganan yang terbatas sehingga hasil evaluasi terhadap program melalui manajemen kasus terlaksana belum sepenuhnya maksimal.

6.1.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi merupakan tahap dimana P2TP2A Tangerang Selatan mengetahui klien yang akan ditanganinya. P2TP2A Tangerang Selatan tentu menangani kasus sesuai dengan tupoksi mereka. Namun, pada tahap identifikasi masalah tidak hanya sekedar mengetahui karakteristik calon klien yang akan ditanganinya, melainkan melakukan penjangkauan klien dengan cara home visit atau kunjungan rumah. Pada tahap ini, P2TP2A Tangerang Selatan melakukan home visit ketika terdapat kendala seperti klien tidak melaporkan masalahnya karena kendala tempat tinggal yang jauh, ketidaktahuan keberadaan instansi P2TP2A, dan pihak klien menganggap bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Tangerang Selatan rumit sehingga tidak melapor. Terdapat kurangnya kesadaran moral masyarakat khususnya orang tua dan pihak keluarga, mengenai masalah kekerasan seksual terhadap anak, dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah

6.1.2 Penilaian (Assessment)

Tahap penilaian dilakukan oleh pihak P2TP2A Tangerang Selatan dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih profesional seperti konselor psikologis karena membutuhkan pendekatan tertentu. Dalam tahap penilaian, P2TP2A menggunakan berbagai metode untuk mengetahui kondisi fisik maupun psikis korban. Untuk mengetahui kondisi fisik korban, P2TP2A menilai menggunakan metode genogram untuk praduga sementara, kemudian untuk mengetahui kondisi psikis korban, P2TP2A melibatkan psikolog untuk melakukan pendekatan awal terhadap korban sebagai acuan melakukan langkah selanjutnya. Dalam hal ini,

pengelola kasus hanya melakukan pendekatan dan mengumpulkan informasi melalui pendekatan korban tidak diiringi pendekatan kepada keluarganya atau significant others sehingga penilaian yang dilakukan kurang komprehensif.

6.1.3 Perencanaan Intervensi

Dalam merumuskan perencanaan pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A Tangerang Selatan perlu hal yang mendukung diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan pegawai, dan ketersediaan dana. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana berupa transportasi untuk melakukan home visit sudah terpenuhi, namun terdapat pada rumah aman yang kurang efektif, rumah aman sendiri sudah memiliki fasilitas perlengkapan yang baik, namun rumah aman disini memiliki batas maksimal waktu penempatan yaitu maksimal 2 minggu, hal tersebut kurang efektif karena rumah aman tersebut dapat dikatakan hanya sebagai rumah singgah. Dalam ketersediaan pegawai P2TP2A Tangerang Selatan sudah cukup memadai, namun terdapat sedikit hambatan pada staf administrasi yang memiliki jumlah pegawai paling sedikit namun tidak sebanding dengan beban kerja mereka yang terbilang cukup banyak, konseling psikologis, melakukan tindakan visum yang terbatas, dan layanan dari mitra hukum yang kurang komprehensif. Dalam hal ketiga diatas, perlu pembenahan lebih lanjut terutama dalam bidang sarana dan pegawai.

6.1.4 Pelaksanaan Intervensi

Dalam pelaksanaan, P2TP2A Tangerang Selatan telah melaksanakan penanganannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Namun hal tersebut belum dikatakan efektif karena kasus kekerasan seksual terhadap anak masih bermunculan.

6.1.5 Monitoring dan Evaluasi

Hasil dari penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Tangerang Selatan dapat dirasakan oleh korban dilihat dari mereka yang sudah pulih secara psikis maupun fisik. Namun pelaksanaan monitoring disini belum dilakukan ke pihak rujukan, dan proses evaluasi dilakukan hanya di lingkup P2TP2A Tangerang Selatan

6.1.6 Terminasi

Proses terminasi dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak tentu dengan syarat korban telah pulih secara psikis maupun fisik.

6.2 Saran

Dalam meningkatkan pelayanan program penanganan kekerasan seksual terhadap anak, pihak P2TP2A Tangerang Selatan dapat melakukan tahapan evaluasi melalui manajemen kasus, berikut saran yang diberikan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program

6.2.1 Identifikasi Masalah

P2TP2A Tangerang Selatan dapat memperluas akses pengaduan kasus masalah kekerasan perempuan dan anak, juga diiringi dengan sosialisasi dan edukasi program tersebut guna membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah

6.2.2 Penilaian/Assessment

Pihak P2TP2A Tangerang Selatan diharapkan lebih memperdalam hasil data dan informasi klien. Juga mengembangkan keterampilan dalam memperoleh informasi mengenai klien, keluarga klien, dan lingkungan klien

6.2.3 Perencanaan

Pada tahap ini, saran peneliti yaitu perlu adanya penambahan pegawai yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Meningkatkan anggaran untuk menyediakan fasilitas kepada klien secara maksimal, memiliki keterampilan dalam memahami istilah medis maupun psikologis, mengembangkan kerjasama dengan instansi lain dan menyusun inovasi strategi, dan menyusun rencana cadangan jika pelaksanaan terjadi diluar ekspektasi

6.2.4 Pelaksanaan Intervensi

Saran penulis pada tahap pelaksanaan intervensi, mampu mengidentifikasi pelayanan-pelayanan yang bervariasi yang dapat dilakukan untuk membantu penanganan masalah klien agar penanganan P2TP2A Tangerang Selatan melakukan kerjasama dan koordinasi yang cukup intens baik dari rujukan maupun komunikasi antara kedua belah pihak

6.2.5 Monitoring dan Evaluasi

Saran penulis pada tahap ini yaitu monitoring dilakukan dengan lembaga rujukan tidak hanya dengan pihak P2TP2A Tangerang Selatan saja. Hal ini guna kedepannya lebih mengetahui kinerja masing-masing lembaga

6.2.6 Terminasi

Dalam proses terminasi, saran yang diberikan oleh penulis yaitu tidak hanya pemutusan hubungan antara klien dengan P2TP2A Tangerang Selatan, meskipun kondisi korban sudah pulih, perlu ada pembekalan untuk korban dan juga pihak keluarga mengenai langkah apa yang akan dilakukan ketika suatu saat trauma nya kambuh karena koban tidak bisa selalu bergantung kepada P2TP2A

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Creswell, John W. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli Inklusif dan Kolaborasi* Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadillah, Putra. 2012. *New Public Governance* Cetakan 1. Malang: UB Press.
- Janet V. Dendhart, Robert B. Dendhart. 2007. *New Public Service (Serving, Not Steering)*. 2nd edition. New York: Routledge
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik ; Konsep, Teori dan Isu* Edisi 3. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*. 2019. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Margaret C. Harrell, M. A. B. 2020. Data Collection Methods Semi-Structured Interviews and Focus Groups. In *Operation Pedro Pan*. Santa Monica, California: RAND Corporation
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Savas, E. S. 1987. *Privatization: The Key to Better Government* First Edit. Chatham House Pub.
- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2019. *Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Terapan Dan Pascasarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung*. Bandung: STKS.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik* Cetakan 1. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoah, Miftah. 1983. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi Suatu Bunga Rampai Bacaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Thoah, Miftah. 1990. *Aspek-aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumber Artikel Jurnal :

Ansell, Chris & Gash, Allison. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, pp. 543-571.

Fuadi, M. Anwar. 2011. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, Vol.8, No. 2, 191–208. DOI: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>

Miles, Matthew B., & Huberman A. Michael. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. In *Sage Publication* Vol. 1304, pp. 89–92.

Ningsih, Ernaya S. B., & Hennyati, Sri. 2018. Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, Vol. 04, No. 02, 56–65. Diakses melalui: <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>

Paramastri, Ira., & Priyanto, Muchammad. A. 2015. Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. *Jurnal Psikologi*, Vol. 37, No. 01, 1 – 12 – 12. DOI: <https://doi.org/10.22146/jpsi.7688>

Sumber Internet :

IndahF. (n.d.). *Pengertian dan Definisi Publik*. Diakses dari https://carapedia.com/pengertian_definisi_publik_info2104.html pada 20 Mei 2022

Image of Child Body Map. (n.d.). Diakses dari <https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dGV8Mej9&id=34965CBB8F7B67276A809198B0FA21ED6EFB3B67&thid=OIP.dGV8Mej9RtZfKtQlucIXcQHAE1&mediaurl=https%3A%2F%2Fd3i71xaburhd42.cloudfront.net%2F1c7ae811aaa33d0e150a6efb895ec026d4d57e05%2F3-Figure2-1.pn> pada 20 Mei 2022

Mbozo, Dayat R. 2011. *Manajemen Kasus Pekerjaan Sosial*. Diakses dari <https://www.dayatrangambozo.blogspot.com/2011/03/menejemen-kasus-pejerjaan-sosial.html> Pada 21 Mei 2022

Phisiceducation. 2013. Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif. Diakses melalui: [Triangulasi dalam penelitian kualitatif | Sains itu menyenangkan \(phisiceducation09.blogspot.com\)](http://Triangulasi%20dalam%20penelitian%20kualitatif%20|%20Sains%20itu%20menyenangkan%20(phisiceducation09.blogspot.com)) Pada 3 Juli 2022

Simfoni-PPA. 2022. *Ringkasan Data*. Diakses dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan_pada_21_Mei_2022

Sumber Kebijakan :

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undan No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.